

## **Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Pelaksanaan Program Kampung KB Di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru**

**M. Asrar As<sup>1\*</sup>, Anwar Parewangi<sup>2</sup>, Ruskin Azikin<sup>3</sup>**

- 1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 3) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

### **Abstract**

*This study aimed to find out how the KB village Kampung Program Implementation Strategy in The Lipukasi Village, Tanete Rilau District, Barru Regency. This study used a qualitative descriptive research method system. Data collection techniques were observation, interview and documentation. While data analysis used data reduction, data presentation and drawing conclusions. The result of this study showed that The Strategy in Implementing the KB Village Program in Lipukasi Village, Tanete Rilau District, Barru Regency had been running quite well, this could be seen with the number of KB village programs that had been implemented. However, constraints occurred in the Implementation such as community participation, budget and communication of each agency was still not optimal. This happened because of the lack of communication between agencies as well as the lack of cooperation between Implementers and related agencies which caused constrained activities*

**Keywords:** *implementation strategy, kb village program*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana Strategi Pelaksanaan Program Kampung KB Di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan adalah sistem metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dalam pelaksanaan program Kampung KB di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru sudah berjalan lumayan baik hal ini dapat di lihat dengan banyaknya program Kampung KB yang terlaksana. Akan tetapi, dalam pelaksanaan terjadi kendala seperti partisipasi masyarakat, anggaran serta komunikasi setiap instansi masih kurang maksimal. Hal tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi antar instansi serta kurangnya kerja sama antar pelaksana dan instansi terkait yang menyebabkan kegiatan terkendala.

**Kata Kunci:** Strategi Pelaksanaan, Program Kampung KB

---

\* masrar12@gmail.com

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang jumlah penduduknya sangat besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 265 juta jiwa lebih pada tahun 2018, jumlah penduduk tersebut terdiri dari 133,88 juta jiwa perempuan dan 131,17 juta jiwa laki-laki. Jumlah penduduk di Indonesia masih akan terus bertambah di setiap tahunnya. Namun, apabila besarnya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang tidak di imbangi dengan kesejahteraan yang baik masih menjadi permasalahan pokok di Indonesia. Di Indonesia mempunyai kebijakan program KB yang bertujuan untuk mensejahterakan keluarga, yaitu dengan cara menunda perkawinan, mengatur kelahiran, dan mengatur jumlah anak yang ideal dalam keluarga dengan menggunakan alat kontrasepsi yang mengarah kepada laki-laki dan perempuan, Program KB ini di harapkan mampu menahan laju pertumbuhan masyarakat dan mengatur pembangunan. Untuk membantu program KB yang sifatnya nasional, dibentuk Kampung KB di Kabupaten/Kota.

Kampung KB mendapat perhatian dan apresiasi tinggi sebagai salah satu strategi dalam pengentasan kemiskinan,

Kampung KB adalah salah satu strategi pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Secara garis besar akan melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementrian/Lembaga, Mitra Kerja, Stakeholders instansi terkait. Sasaran Kampung KB diutamakan adalah penduduk yang tinggal di wilayah miskin, padat penduduk, kurang memiliki akses kesehatan, terpencil, pesisir, kumuh, dan kesertaan ber-KB nya masih rendah.

Di Kabupaten Barru, Kampung KB telah menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mengatur kesejahteraan masyarakat dan mengatur pembangunan serta membantu program KB. Program Kampung KB ini diharapkan mampu menahan angka laju pertumbuhan penduduk di daerah terpencil, menuntaskan kemiskinan, mengejar ketertinggalan masyarakat pedesaan, serta masyarakat diharapkan ikut dalam program Kampung KB, karena Kampung KB mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan indah, dan membuat masyarakat akan mengikuti program KB.

Partisipasi masyarakat Desa Lipukasi minim menjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan kampung KB tidak berjalan lancar, contohnya

pada saat kegiatan gotong royong masyarakat desa lipukasi kurang ikut serta dalam kegiatan tersebut, serta kurangnya pemahaman pemangku kepentingan di setiap level akan konsep kampung KB mereka kurang berpartisipasi dengan pelaksanaan kampung KB ini karena mereka berfikir bahwa kampung KB hanya berfokus pada KB saja, mereka tidak mengetahui bahwa kampung KB ini mampu membentuk kerjasama antar masyarakat di desa tersebut. Masalah pelaksanaan kampung KB ini juga terkendala dengan dana karena untuk melakukan pengembangan kegiatan memerlukan dana sedangkan dana desa sangat terbatas.

Strategi adalah sebuah cara untuk mencapai hasil akhir, yang menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. (Thompshon dalam Oliver 2007:2). Proses manajemen strategi memiliki tiga tahapan yaitu Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Strategi. Formulasi strategi, memperhatikan peluang dan ancaman eksternal (dari luar), mengembangkan visi dan misi, melihat dan memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal (dari dalam), menentukan tujuan jangka panjang, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan.

Menurut Wheelen dan Hunger dalam Umar (2010:16) “manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategik meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategik atau perencanaan jangka panjang), evaluasi dan pengendalian.” sedangkan David (2003) mengatakan manajemen strategik didefinisikan sebagai suatu seni dan ilmu untuk memformulasikan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi, dengan itu maka organisasi bisa mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Menurut Wheelen dan Hunger dalam Umar (2010:16) manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategik meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategik atau perencanaan jangka panjang), evaluasi dan pengendalian. Bennet dalam Oliver (2007:2) adalah Strategi merupakan arah yang dipilih orang untuk diikuti dalam pencapaian misinya. Strategi dapat di definisikan yaitu sekumpulan pilihan kritis terhadap penerapan dan perencanaan serangkaian rencana

tindakan alokasi sumber daya yang penting dalam rangka mencapai tujuan dasar dan sasaran yang ingin di capai, dengan memperhatikan keunggulan, komparatif, kompetitif dari individu atau organisasi.

Menurut Sedarmayanti (2014), makna konsep manajemen strategis adalah : (1)menghubungkan fungsi perencanaan dengan sistem administrasi dan struktur organisasi, (2)strategi dan implementasi merupakan satu kesatuan yang menggambarkan tugas manajerial di semua tingkat dan lini organisasi, (3) tiga isu penting dalam konsep manajemen strategis meliputi pentingnya integrasi sistem administrasi dan struktur organisasi, pentingnya integrasi antara strategi dan implementasi, serta pentingnya infrastruktur manajerial dan budaya. Pearce and Robinson (2000) mengatakan bahwa formulasi strategi telah diawali dengan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal organisasi.

Menurut Dess dan Lumpkin (2003) ada dua elemen pokok yang merupakan jantung manajemen strategik. Yang pertama, manajemen strategik memerlukan 3 proses yang berkelanjutan yaitu analisis, keputusan, dan aksi. Kedua, inti dari manajemen strategi yaitu mempelajari mengapa

perusahaan mampu mempunyai kinerja yang mengungguli perusahaan lain.

Dalam tahapan Penyusunan strategi hal-hal yang perlu di perhatikan dalam menyusun strategi: 1) Seleksi Yang Mendasar Dan Kritis Terhadap Permasalahan, Seleksi yang mendasar dan kritis terhadap permasalahan dilakukan berdasarkan faktor internal maupun eksternal yang menjadi penyebab permasalahan individu atau organisasi. Permasalahan bersifat darurat tidak selalu mengarah kepada permasalahan yang penting, tetapi permasalahan ini tetap membutuhkan penanganan cepat dan responsif. Permasalahan darurat yang butuh respon cepat untuk segera diselesaikan secepatnya. Namun harus di kaji secara mendalam, bahwa ternyata permasalahan urgent/darurat belum tentu penting. 2) Tujuan Dasar Dan Sasaran Strategis, Dalam hal ini tujuan dasar dan sasaran strategis menjadi tolak ukur keberhasilan suatu strategi, berhasil tidaknya suatu strategi di tentukan oleh tujuan dan sasarannya. 3) Perencanaan Tindakan, Dalam penyusunan strategi, yang perlu diperhatikan ada dua yaitu Pertama, rencana konsepsional atau teoritis, sebagai rencana yang mampu meningkatkan strategi sehingga rencana dapat terwujud. Kedua, rencana

tindakan atau *action plan*, yang lebih berdasarkan pada faktor-faktor lapangan dengan segala perkiraan yang mungkin terjadi. 4) Rencana Penyumberdayaan (*Resourching Plan*), Rencana tindakan untuk alokasi sumber daya manusia menurut Armstrong (2003:282) mencakup empat tahapan yaitu: perekrutan, pelatihan, pengurangan karyawan dan peningkatan fleksibilitas. Armstrong (2003: 291) dalam konteks manajemen strategis sumber daya manusia menguraikan langkah yang harus diperhatikan ketika merumuskan strategi fleksibilitas sebagai berikut: a) Melakukan pandangan yang radikal pada pola pekerjaan tradisional untuk menemukan alternatif dari staf purna waktu, staf tetap, hal ini mungkin membentuk pembedaan tenaga kerja kedalam suatu kelompok inti dan satu atau lebih bukan kelompok inti. b) Mengontraskan pekerjaan-membuat pekerjaan dilakukan oleh perusahaan eksternal atau individu di luar perusahaan itu sendiri. c) Multi keterampilan untuk meningkatkan kemampuan manusia berganti pekerjaan atau melaksanakan tugas apapun yang harus dilakukan sumber daya manusia sebagai suatu tim. 5) Pertimbangan Keunggulan, Supriyono (2000:5) menyatakan bahwa perumusan strategi disusun terlebih dahulu sebelum

disusunnya perencanaan strategi. Pendapat ini semakin menguatkan pentingnya identifikasi keunggulan sedini mungkin. Perencanaan strategis pada akhirnya mempertimbangkan keunggulan. Namun jauh sebelum itu disusunnya perencanaan strategis memang sudah harus diidentifikasi keunggulan-keunggulan yang ada pada suatu entitas. Daya saing yang diperlukan oleh setiap entitas berada dalam keadaan saling berkompetisi ketat dengan para competitor. Masing-masing harus memiliki keunggulan yang dapat menjadi bahan pertimbangan sangat penting untuk mensukseskan perumusan strategi. 6) Pertimbangan Berkelanjutan, Keberlanjutan suatu strategi yang diterapkan oleh suatu perusahaan akan memungkinkan sebuah perusahaan menjadi semakin peka terhadap setiap perubahan yang terjadi. Globalisasi yang telah menyebabkan kompetisi antar perusahaan mampu melewati batas-batas teritorial menuntut perusahaan mampu mengendalikan situasi dengan strategi yang antisipatif dan berkelanjutan. Pertimbangan berkelanjutan dalam penyusunan strategi dapat disebut sebagai langkah penilaian terakhir atas keandalan dan kemantapan strategi. Strategi yang andal tentunya strategi yang mampu melewati berbagai kendala

dan tantangan dalam implementasinya. Pertimbangan - pertimbangan keberlanjutan atas keberhasilan penerapan suatu strategi harus didukung oleh alokasi jangka waktu implementasi yang jelas dan kalkulatif.

Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sebatier dalam Wahab (2012:135), implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2012:135), mengatakan bahwa proses implementasi sebagai *“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objective set forth in prior policy decision”* yaitu

implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individual/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Grindle dalam Agustino (2008:139), mendefinisikan keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan kedua apakah tujuan program tercapai. Lester dan Stewart dalam Agustino (2008:139), proses implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan dilakukan selama dua bulan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Alasan peneliti menjadikan Desa lipukasi sebagai tempat penelitian hal ini karena peneliti melihat di Desa Lipukasi tempat di laksanakannya program yang di namakan kampung kb tersebut. Program Kampung KB di Desa

Lipukasi telah di terapkan namun permasalahan yang terjadi yaitu masyarakat desa lipukasi kurang partisipasi dalam menyukseskan kegiatan kampung KB, serta kurangnya pemahaman pemangku kepentingan kurang berpartisipasi dengan pelaksanaan kampung KB ini karena mereka berfikir bahwa kampung KB hanya berfokus pada KB saja.

Sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penulis melakukan wawancara dengan informan menggunakan pedoman wawancara. Dengan jumlah informan, 7 informan, 1 orang Kabid Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera, 1 orang Kepala Desa Lipukasi, 1 orang Sekertaris POKJA, 1 orang anggota POKJA dan 3 orang masyarakat.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Untuk menyajikan data dari berbagai jawaban informan, penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta teknik keabsahan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kampung KB di Desa lipukasi di bentuk pada tahun 2017 berdasarkan

surat edaran bupati pada tahun 2017 dan juga berdasarkan Perda Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Tugas Pokok POKJA menurut SK kepala desa adalah sebagai berikut: 1) Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan kampung KB dusun lipukasi desa lipukasi kecamatan tanete rilau, 2) Mempersiapkan bahan-bahan dan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, 3) Melaksanakan kegiatan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, 4) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada desa.

Kelompok Kerja (POKJA) di Kampung KB di Desa Lipukasi dibentuk oleh kepala desa lipukasi yang diantaranya anggota-anggota POKJA terdiri atas berbagai seksi dan anggota POKJA berdomisili di desa lipukasi. Kepala desa memiliki peran penting yaitu menjadi penanggung jawab di segala kegiatan program kampung KB. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah di laksanakan kelompok kerja (POKJA) Kampung KB desa lipukasi antara lain: 1) Pelatihan membuat bros, gelang dan tas pesta oleh bidang KB bekerja sama dengan ketua Asosiasi Kelompok UPPKS Kab.Barru, 2) Advokasi pada

tokoh masyarakat dan tokoh agama, 3) Pembinaan kader KB, 4) Sosialisasi yang dilakukan oleh perwakilan BKKBN Prov. Sulsel, 5) Lokakarya mini Kampung KB, 6) Pembuatan saluran air, 7) Kerja bakti pemakaman islam dusun Lipukasi, 8) Kerja bakti di masjid nurul aini dusun lipukasi, 9) Kerja bakti persiapan rumah dataku, 10) Pengolahan ban bekas menjadi pot bunga, 11) Pelatihan memandikan jenazah, 12) Kerja bakti membersihkan lorong 1 pasca pembuatan saluran air oleh ibu-ibu setempat, 13) Pembuatan rumah data, 14) Pengajian rutin 2 kali sebulan

### **Adanya Komunikasi**

Menurut Edward dalam Budi Winamo (2007:174) komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan /atau publik dan sikap serta tanggapan dari pra pihak yang terlibat. Sedangkan pengertian komunikasi itu sendiri merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program/kebijakan. Komunikasi merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi implementasi

kebijakan publik. Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dari komunikasi yang ada. Kebijakan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga informasi yang disampaikan harus akurat. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran bersangkutan.

Dalam pelaksanaan program Kampung KB di desa lipukasi Komunikasi yang dilakukan yaitu dengan sosialisasi. Dengan sosialisasi, pihak yang melaksanakan program ini menjelaskan keuntungan serta kelebihan program ini. Kemudian jika dilihat dari aspek (a) transmisi, Transmisi (penyaluran) informasi yang baik akan menghasilkan pelaksanaan yang baik pula, adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan yang disesuaikan dengan hasil penelitian. Penyaluran informasi yang dilakukan pelaksana kebijakan dengan masyarakat disampaikan melalui media langsung yakni dilakukan dengan melalui pertemuan dan sosialisasi. (b) kejelasan informasi, Kejelasan informasi dalam pelaksanaan program kampung KB terdiri dari penyampaian instansi yang

ingin melakukan kegiatan di kampung KB di Desa Lipukasi, serta penyampaian pihak pelaksana yaitu POKJA harus memiliki keterbukaan mengenai informasi penyelenggaraan kegiatan program Kampung KB agar mengurangi kesalahpahaman masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan. Kejelasan informasi dibutuhkan agar seluruh penyelenggara mengetahui secara jelas informasi apa saja yang akan dilaksanakan oleh pihak pelaksana. Apabila ada perubahan jadwal kegiatan sebaiknya harus dikonfirmasi secepatnya. dan (c) konsistensi informasi, Konsistensi diperlukan agar pelaksanaan suatu program yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas, jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Dari hasil wawancara mengenai transmisi dapat diketahui bahwa penyaluran komunikasi dalam pelaksanaan program Kampung KB di Desa Lipukasi sangat baik karena media yang dipakai adalah media langsung. Dengan media langsung akan

mengurangi terjadi kesalahpahaman tentang kegiatan yang ingin di adakan Kelompok Kerja bekerja sama dengan instansi-instansi yang ada. Dapat diketahui bahwa strategi pelaksanaan program kampung KB di Desa Lipukasi dalam segi (a) transmisi (penyaluran) sudah baik karena mendapatkan respon baik dari masyarakat pada saat melaksanakan salah satu kegiatan, karena kegiatan kampung KB memang di peruntukkan untuk masyarakat. Meskipun ada sebagian masyarakat yang masih berfikiran apabila ingin berpartisipasi dalam program kampung Kb harus ikut KB. Hal ini menjadi masalah yang harus di selesaikan pihak pelaksana agar tidak adanya kesalahpahaman. (b) Kejelasan informasi, dalam pelaksanaan program kampung KB terdiri dari penyampaian instansi yang ingin melakukan kegiatan di kampung KB di Desa Lipukasi, serta penyampaian pihak pelaksana yaitu POKJA harus memiliki keterbukaan mengenai informasi penyelenggaraan kegiatan program Kampung KB agar mengurangi kesalahpahaman masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan. Kejelasan informasi dibutuhkan agar seluruh penyelenggara mengetahui secara jelas informasi apa saja yang akan dilaksanakan oleh pihak pelaksana. Apabila ada perubahan

jadwal kegiatan sebaiknya harus di konfirmasi secepatnya.

Dari hasil wawancara bahwa kejelasan informasi sudah cukup baik, apabila dinas yang melaksanakan kegiatan di Kampung KB desa lipukasi harus memiliki peran aktif dalam menyampaikan dan menyelenggarakan kegiatannya serta kerja sama dengan pihak pelaksana di lapangan. Dapat di simpulkan bahwa kejelasan informasi yang di dapat oleh masyarakat sangat baik karena langsung menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat dan masyarakat dengan mudah mengetahui bahwa akan ada kegiatan yang ingin di laksanakan.

### **Adanya Sumber Daya**

Indikator-indikator yang di gunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi pelaksanaan kebijakan terdiri dari (1) staf, Kampung KB di Desa Lipukasi saat ini memiliki sekitar 40 orang pelaksana di lapangan dengan ini yang di maksud adalah Kelompok Kerja (POKJA). Dengan jumlah sekitar 40 orang dalam ruang lingkup kampung KB di Desa Lipukasi yang ada sudah cukup memadai namun karena kampung KB di Desa Lipukasi yang tadinya hanya berpusat di Dusun Lipukasi ingin di kembangkan menjadi ruang lingkup

desa, Kampung KB ini rencananya akan di perluas ruang lingkupnya bukan lagi dusun tapi rencananya ingin di perluas menjadi satu desa.

Dari hasil wawancara di ketahui bahwa Program Kampung KB di Lipukasi ruang lingkupnya akan di perluas dan dengan sumber daya manusia yang ada sudah cukup memadai namun apabila rencana ingin membuat ruang lingkup lebih luas maka sumber daya manusia harus di tambah, karena apabila jumlah sumber daya manusia (staf) tidak di tambah dan ruang lingkup Kampung KB semakin luas akan membuat sumber daya manusia itu sendiri kewalahan. (b) informasi, Dalam pelaksanaan program Kampung KB di Lipukasi, kekurangan informasi dari tingkat pusat akan kebutuhan yang di perlukan oleh pelaksana lapangan. Program Kampung KB di Lipukasi hanya di bebaskan kepada pelaksana lapangan yakni Kelompok Kerja (POKJA). Kurangnya pengetahuan/informasi dalam melaksanakan program Kampung KB, dari tingkat pusat kurang membantu dalam menyelesaikan program Kampung KB. Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, informasi/pengetahuan dalam pelaksanaan program Kampung KB, cara menyelesaikan kegiatan yang di

laksanakan yaitu dengan mengandalkan pelaksana di lapangan seharusnya ada kerja sama antara pelaksana lapangan dengan tingkat pusat sehingga meminimalisir kesalahan yang ada. Peran POKJA sangat berpengaruh dalam program Kampung KB ini namun harus ada kerja sama baik di tingkat pusat maupun instansi-instansi yang mengadakan kegiatan. (c) Kewenangan, Dalam pelaksanaan Kampung KB di Lipukasi, semua kegiatan terkendala dengan dana karena dana yang di pakai sangat terbatas, anggaran terbatas membuat sebagian kegiatan belum terealisasikan, maka dari itu perlu perhatian lebih terhadap anggaran karena kegiatan tidak akan berjalan lancar apabila tidak memiliki anggaran. Berdasarkan wawancara di atas di simpulkan bahwa anggaran untuk pelaksanaan program kampung KB sangat terbatas, banyak kegiatan yang ingin di realisasikan tapi terkendala di anggaran. Kerja sama sangat di butuhkan serta komunikasi antara pelaksana kegiatan dengan tingkat pusat. (d) fasilitas, Kampung KB di desa lipukasi sudah mempunyai fasilitas yang tidak di miliki oleh Kampung KB lain yang ada di kabupaten Barru yaitu Rumah data. Rumah data bertujuan untuk menyimpan semua data yang bersangkutan dengan kebutuhan

masyarakat contohnya data dari dinas pendidikan tentang jumlah anak putus sekolah dan lain-lain, rumah data ini sangat membantu Program Kampung KB dalam mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di simpulkan bahwa fasilitas Kampung KB di Desa Lipukasi masih kurang memadai dan masih harus di tingkatkan seperti gapura yang menandakan lokasi Kampung KB ini sangat penting di wujudkan karena agar profil kampung KB terlihat, masyarakat sangat berharap agar pelaksana program mampu mengadakan fasilitas yang memadai, program Kampung KB dapat berjalan dengan lancar apabila fasilitas yang ada mendukung.

### **Adanya Disposisi**

Disposisi yang di lakukan dalam melaksanakan program kampung KB adalah tentang komitmen. Komitmen yang di buktikan dengan melihat alasan pelaksana untuk dapat melaksanakan program dengan baik, tujuan/perubahan yang ingin di capai dan perubahan yang telah di capai oleh pelaksana dalam melaksanakan program Kampung KB di Desa Lipukasi. Dari hasil wawancara berkaitan dengan sikap para pelaksana yang melaksanakan segala kegiatan yang ada sudah sangat maksimal, apa

yang di lakukan POKJA membuat kampung kb ini bisa aktif kembali, serta komitmen yang di buktikan oleh POKJA sangat berperan penting, mereka bekerja sangat keras untuk kemajuan program ini. Dengan adanya rumah data yang menjadi satu-satunya Kampung KB di Kabupaten Barru yang memiliki rumah data dan serta banyak perubahan yang terjadi membuat Kampung KB di Desa Lipukasi akan di jadikan Kampung KB Percontohan oleh Kampung KB lain yang ada di Kabupaten Barru.

#### **Adanya Struktur Birokrasi**

Dengan adanya POKJA ini membuat struktur birokrasi yang ada tidak terlalu rumit karena anggota POKJA di dalamnya kebanyakan orang-orang bertempat tinggal di Lipukasi. Dari hasil wawancara struktur birokrasi yang ada di kampung kb desa lipukasi sudah bagus karena saya sudah membentuk yang namanya kelompok kerja (POKJA), POKJA inilah yang menjadi pelaksana di lapangan nantinya. Susunan POKJA tersusun atas berbagai seksi-seksi dan setiap seksi memiliki tanggung jawab di setiap kegiatan yang di lakukan, misalnya seksi agama. Kegiatan memandikan jenazah, kegiatan ini menyangkut

dengan keagamaan maka dari itu seksi agama bertanggung jawab dengan kegiatan ini. Ada banyak seksi-seksi lain yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menyangkut dengan seksi nya masing-masing.

#### **KESIMPULAN**

Dalam penelitian ini dapat di simpulkan: (a) Komunikasi, Strategi Pelaksanaan Program Kampung Kb Di Desa Lipukasi secara umum sudah berjalan dan terlaksana dengan baik. Dari hasil penelitian terkait dengan komunikasi sudah sangat baik, karena dari indikator mengenai komunikasi baik dari segi transmisi, kejelasan dan konsistensi informasi sudah sangat baik karena respon masyarakat di desa lipukasi sudah baik dan juga mengurangi pemikiran masyarakat tentang kampung kb milik kb saja. Hal ini karena adanya sosialisasi terlebih dahulu yang membuat masyarakat paham akan kegiatan yang akan di laksanakan. (b) Sumber daya, Secara umum sumber daya di kampung KB desa lipukasi sudah cukup baik, dari aspek staff (sumber daya manusia) sudah lumayan baik tapi karena kampung KB ini akan di perluas ruang lingkungnya maka dari itu pengurus Kelompok Kerja (POKJA) harus di

tambah sebelum di realisasikan menjadi Kampung KB tingkat desa karena untuk sekarang Kampung KB di desa lipukasi hanya di lakukan di satu lorong. Kegiatan-kegiatan Kampung KB ada banyak, namun terkendala oleh dana. Kampung KB di desa lipukasi, fasilitas yang di miliki saat ini adalah Rumah data. Rumah data ini menjadi perbedaan dengan kampung-kampung kb lainnya. Berdasarkan penelitian Sumber daya di kampung kb desa lipukasi dapat di simpulkan, sumber daya manusia sudah memadai tapi apabila nantinya terealisasikan perluasan jadi tingkat desa maka perlu penambahan sumber daya manusia. (c) Disposisi, Secara umum disposisi kampung kb desa lipukasi sudah sangat baik, hal ini di lihat dari perubahan-perubahan yang terjadi di kampung kb desa lipukasi. Dan menjadikan kampung kb ini nantinya akan dijadikan kampung kb percontohan. Hal ini tak terlepas dari kerja keras di setiap instansi dan kerja keras POKJA sebagai pelaksana di lapangan. Dengan adanya rumah data membuat perubahan yang signifikan karena satu-satunya kampung kb di kabupaten barru yang memiliki rumah data. (d) Struktur birokrasi, Dari hasil penelitian dapat di simpulkan, dengan adanya kelompok kerja (POKJA) menjadikan struktur birokrasi tidak

terlalu rumit dan berbelit-belit. Kegiatan-kegiatan yang di laksanakan di lapangan langsung di tangani oleh POKJA selain itu POKJA juga terdiri dari beberapa seksi dan membuat kegiatan-kegiatan berjalan dengan lancar. Struktur birokrasi sudah sangat baik karena tersusun dengan baik. Pihak pelaksana juga apabila ada kegiatan tidak rumit dan semua nya terarah dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta ok
- Amstrong, dan Kotler.2003. *Dasar-dasar Pemasaran, Jilid 1, Edisi Kesembilan*: PT. Indeks Gramedia, Jakarta
- David R, Fred. 2006. *Strategic Management Konsep Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat
- Dess, Gregory R., dan G.T. Lumpkin. 2003. *Strategic Management. International Edition*. Mc Graw Hill
- Nawawi, Hadari. 2012. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Oliver, Sandra .2007. *Strategi Public Relation*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ok
- Pearce, John A, dan Robinson, Richard B. 2013. *Manajemen strategis (formulasi implementasi dan pengendalian) buku 1 edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat
- Rachmawati, Ike Kusdyah. 2008. *Manejemen sumber daya*

- manusia*. Jakarta: Edisi Pertama, Cetakan Pertama Andi Offset
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Strateji*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sedarmayanti.2014. *Manajemen Strategi*. Bandung: PT Refika Tama, 2014.
- Suaib, Muhammad Ridha. 2016.*Pengantar Kebijakan Publik: dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, hingga Implementasi Kebijakan Publik*.Yogyakarta: Calpulis.
- Supriyono. 2001. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Umar, Husein. 2005. *Strategic Management in Action*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*.Jakarta: PT Bumi Aksara.